



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.211.474.180.728,00 (Tiga triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp1.327.479.175.919,00;
- b. Pendapatan transfer Rp1.883.995.004.809,00; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp1.327.479.175.919,00 (Satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah daerah Rp1.185.812.074.991,00;
 - b. Retribusi daerah Rp49.522.865.450,00;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp85.924.136.521,00;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.185.812.074.991,00 (Satu triliun seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.522.865.450,00 (Empat puluh sembilan

milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.924.136.521,00 (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.812.074.991,00 (Satu triliun seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Rp34.784.873.188,00;
 - b. Pajak Air Tanah Rp14.769.561.699,00;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet Rp84.800.000,00;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp11.106.861,00;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp212.387.985.423,00;
 - f. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Rp219.328.038.851,00;
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp395.063.162.717,00;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp199.963.393.255,00;
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp109.419.152.997,00;
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.784.873.188,00 (Tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.769.561.699,00 (Empat belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.800.000,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.106.861,00 (Sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp212.387.985.423,00 (Dua ratus dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp219.328.038.851,00 (Dua ratus sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp395.063.162.717,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp199.963.393.255,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp109.419.152.997,00 (Seratus sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp49.522.865.450,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa umum Rp26.858.796.200,00;
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.002.069.250,00;

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp17.662.000.000,00;
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.858.796.200,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.002.069.250,00 (Lima milyar dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.662.000.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Rp6.220.098.957,00;
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp85.924.136.521,00 (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rp1.277.675.000,00;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rp2.567.491.305,00;
 - c. Jasa Giro Rp2.000.000.000,00;
 - d. Pendapatan Bunga Rp350.000.000,00
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp300.000.000,00
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp5.000.000.000,00;

- g. Pendapatan BLUD Rp74.428.970.216,00;
- (4) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.277.675.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.567.491.305,00 (Dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).
- (6) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (7) Pendapatan Bunga Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp74.428.970.216,00 (Tujuh puluh empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.191.474.180.728,00 (Tiga triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi Rp2.744.413.244.039,00;
- b. Belanja modal Rp377.060.936.689,00;
- c. Belanja tidak terduga Rp70.000.000.000,00; dan
- d. Belanja transfer Rp0,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.744.413.244.039,00 (Dua triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta dua

ratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp1.221.093.272.226,00;
 - b. Belanja barang dan jasa Rp1.473.292.126.991,00;
 - c. Belanja bunga Rp0,00;
 - d. Belanja subsidi Rp1.445.015.146,00;
 - e. Belanja hibah Rp48.582.829.676,00; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.093.272.226,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.473.292.126.991,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.445.015.146,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.582.829.676,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.093.272.226,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN Rp669.484.367.082,00;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp508.419.408.413,00;

- c. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD Rp37.993.145.283,00;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp1.749.754.168,00
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.533.120.000,00
 - f. Belanja Pegawai BLUD Rp1.913.477.280,00;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.484.367.082,00 (Enam ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp508.419.408.413,00 (Lima ratus delapan milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.993.145.283,00 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.749.754.168,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.533.120.000,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BLUD Rp1.913.477.280,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.484.367.082,00 (Enam ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN Rp508.743.111.506,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp45.984.584.031,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp9.669.961.497,00;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp33.090.394.008,00;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp3.743.250.600,00;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp22.740.154.484,00;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp5.950.615.719,00;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp142.882.911,00;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp35.350.501.452,00;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.070.321.274,00;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.998.589.600,00;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.743.111.506,00 (Lima ratus delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat seratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.984.584.031,00 (Empat puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.669.961.497,00 (Sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.090.394.008,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.743.250.600,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.740.154.484,00 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.950.615.719,00 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp142.882.911,00 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.350.501.452,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.070.321.274,00 (Satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.998.589.600,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp508.419.408.413,00 (Lima ratus delapan milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp260.007.433.728,00;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp70.621.474.154,00;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp1.301.438.600,00;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp176.489.061.931,00;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.007.433.728,00; (Dua ratus enam puluh milyar tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp70.621.474.154,00 (Tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.301.438.600,00 (Satu miliar tiga ratus satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.489.061.931,00 (Seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp0,00; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp20.000.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp0,00;
 - b. Pencairan dana cadangan Rp0,00;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan PAD Rp0,00;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

Pasal 16

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp Rp0,00 (Nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp20.000.000.000,00) (Minus Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus |

Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



RONI RAKHMAT

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



ZARMAN CANDRA

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 35.



KOTA PEKANBARU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.327.479.175.919,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.185.812.074.991,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	34.784.873.188,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	32.886.990.479,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	32.886.990.479,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.895.076.273,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.895.076.273,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.806.436,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.806.436,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	14.769.561.699,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	14.769.561.699,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	14.769.561.699,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	84.800.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	84.800.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	84.800.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.106.861,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	11.106.861,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	11.106.861,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	212.387.985.423,00
4.1.01.15.01	PBBP2	212.387.985.423,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	212.387.985.423,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	219.328.038.851,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	195.063.234.966,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	195.063.234.966,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.264.803.885,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.264.803.885,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	395.063.162.717,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	129.541.759.480,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	122.121.759.480,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	7.420.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	168.944.649.671,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	168.637.005.954,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	307.643.717,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	64.718.393.424,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	64.718.393.424,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	12.661.053.316,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.661.053.316,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	19.197.306.826,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	9.211.400.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	65.720.000,00
4.1.01.19.05.0003	PBJT-Kontes Kecantikan	2.650.000,00
4.1.01.19.05.0004	PBJT-Kontes Binaraga	2.650.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	5.300.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	5.300.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.650.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	4.714.526.826,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	769.030.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.060.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	248.040.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	3.110.040.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	199.963.393.255,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	199.963.393.255,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	199.963.393.255,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	109.419.152.997,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	109.419.152.997,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	109.419.152.997,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.522.865.450,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	26.858.796.200,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.764.796.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.764.796.200,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.034.000.000,00
4.1.02.01.15	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	60.000.000,00
4.1.02.01.15.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	60.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.002.069.250,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.293.800.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	323.800.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	20.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	28.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	28.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	367.200.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	367.200.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	845.030.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	845.030.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	835.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	835.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.139.250,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.139.250,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.188.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.188.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	7.800.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	7.800.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	339.100.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	339.100.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	17.662.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	17.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	17.500.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	162.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	162.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.220.098.957,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.337.938.223,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.337.938.223,00
4.1.03.02.04	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	2.882.160.734,00
4.1.03.02.04.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	2.882.160.734,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.924.136.521,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.277.675.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.277.675.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.277.675.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.567.491.305,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	500.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	500.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.390.305.305,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	350.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	350.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	350.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	158.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	158.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	301.500.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	25.000.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	1.000.000,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	500.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	500.000,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	604.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	600.000.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	1.000.000,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	3.000.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	500.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	30.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	30.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	75.000.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.800.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	3.800.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	74.428.970.216,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.228.970.216,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.228.970.216,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	17.200.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	17.200.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.883.995.004.809,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.728.462.518.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.652.677.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.652.677.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.652.677.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	269.060.224.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	184.363.771.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	54.619.380.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	129.744.391.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	80.488.562.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	74.301.422.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.526.675.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.826.660.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.207.891.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.207.891.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.049.903.440.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	927.402.559.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.01.0001	DAU	927.402.559.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	122.500.881.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	16.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.130.982.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	71.100.083.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.000.616.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	5.669.200.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	393.846.177.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	49.084.477.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	284.975.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.118.915.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.910.518.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.512.980.000,00
4.2.01.09.01.0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	4.026.379.000,00
4.2.01.09.01.0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	2.318.953.000,00
4.2.01.09.01.0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	10.683.757.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	344.761.700.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	149.309.600.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.233.750.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	140.842.474.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.058.500.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	8.669.100.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.668.943.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.143.400.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.945.796.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	11.860.698.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	433.779.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.532.486.809,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	155.532.486.809,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	155.532.486.809,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	61.559.859.036,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.327.323.997,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.251.758.083,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	478.605.051,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.914.940.642,00
	Jumlah Pendapatan	3.211.474.180.728,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.744.413.244.039,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.221.093.272.226,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	669.484.367.082,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	508.743.111.506,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	436.570.701.489,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.172.410.017,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	45.984.584.031,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.102.273.412,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.882.310.619,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.669.961.497,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.669.961.497,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.090.394.008,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.607.016.254,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.483.377.754,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.743.250.600,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.582.590.122,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	160.660.478,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.740.154.484,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.855.282.526,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.884.871.958,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.950.615.719,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.510.721.450,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	439.894.269,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	142.882.911,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.698.752,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.184.159,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.350.501.452,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.778.083.644,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.572.417.808,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.070.321.274,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	916.702.734,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	153.618.540,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.998.589.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.531.736.649,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	466.852.951,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	508.419.408.413,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	260.007.433.728,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	258.461.640.780,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.545.792.948,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	70.621.474.154,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.123.170.796,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	498.303.358,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.301.438.600,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.301.438.600,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.489.061.931,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	1.719.909.551,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	560.429.973,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	3.217.730,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	421.449,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.059.543.100,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.322.386.910,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.122.887.261,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	49.765.500,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	51.100.457,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	750.000,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	47.500.000,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	176.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	140.842.474.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.058.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.993.145.283,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	191.570.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	191.570.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.929.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.929.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.515.750,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.515.750,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.492.964,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.492.964,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.730.200.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	426.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.200.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.288.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.101.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.101.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	461.583.569,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	461.583.569,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.749.754.168,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.706.331,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.706.331,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	17.304.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.284.848,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.112.553,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.817.392,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.817.392,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	224.640,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	224.640,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.524.340.484,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	95.575.340,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.351.164,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	128.968,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.210,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	278.271.948,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	407.364.846,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	717.614.008,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.533.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.140.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.140.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.913.477.280,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.913.477.280,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.913.477.280,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.292.126.991,00
5.1.02.01	Belanja Barang	367.187.218.041,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	366.582.731.561,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	73.622.549.775,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	682.795.978,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.461.374.832,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	16.650.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	139.538.700,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.796.800,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	33.381.680,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.172.800.761,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	615.991.140,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	262.551.700,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.096.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	28.995.800,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.804.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.600.023.055,80
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.263.015.140,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.919.851.311,60
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.313.476.220,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.031.877.885,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.199.743.581,50
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.223.511.524,10
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.587.787.990,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	74.820.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.785.072.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.186.061.965,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.777.974.460,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.210.814.892,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.609.138.249,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	29.137.746.235,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.587.915.832,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.080.013.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33.120.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.073.342.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	690.047.500,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	271.028.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.441.634.400,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	430.700.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.770.657.054,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.105.131.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	337.644.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	246.815.300,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.302.735.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	269.111.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	539.095.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	113.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	604.486.480,00
5.1.02.01.04.0073	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	311.040,00
5.1.02.01.04.0076	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	362.880,00
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.257.800,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.419.200,00
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	589.317.120,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.576.840,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	5.241.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	740.920.793.628,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	567.196.196.705,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.061.495.950,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.030.850.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	314.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.382.794.500,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.025.804.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	585.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	94.950.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	57.942.500,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.646.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	29.270.580.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.076.631.525,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	953.400.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.261.840.420,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.174.710.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.205.121.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.202.754.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	987.500.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	19.040.666.600,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	426.001.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.092.154.200,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	711.609.985,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.711.035.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.318.403.360,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.035.334.184,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.511.324.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.777.377.522,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.250.000.194,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	17.783.520,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.473.148.320,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	176.400.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.996.314.744,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.703.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	476.850.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	26.160.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.070.500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	157.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	23.383.770.567,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	61.300.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	198.008.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	103.500.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	39.743.393.332,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	446.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	509.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.716.015.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	703.696.059,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	41.358.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	111.866.944.312,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	987.512.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.351.339.191,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	932.085.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	43.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.847.330.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	476.400.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.671.200.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	198.000.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.551.108.720,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	92.468.410.798,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	83.772.052.432,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	802.740.960,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.337.579.006,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.556.038.400,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	498.687.400,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	463.359.000,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	9.828.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	25.500.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.313.276.071,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	205.000.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	3.380.100.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	27.701.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.454.710.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.161.390.308,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	625.000.000,00
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.632.407.600,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	456.776.800,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	15.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.518.376,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	242.876.400,00
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	201.300.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	40.336.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	2.850.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	198.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	198.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	37.500.000,00
5.1.02.02.04.0413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	250.008.787,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.221.097.200,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.745.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	70.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.520.010.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	29.029.200,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	180.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	198.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.279.958.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	140.400.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	43.200.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	165.488.800,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	165.488.800,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.203.874.596,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.485.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	125.640.991,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	32.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	897.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	540.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	60.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.575.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	695.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.000.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	92.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	668.274.605,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	1.060.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	775.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	398.959.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.885.776.800,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	875.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	275.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	45.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	3.620.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	524.900.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.785.876.800,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.760.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00
5.1.02.02.10.0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	280.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	85.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	130.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	65.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.105.937.238,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.214.473.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.200.132.593,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.661.331.645,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.532.048.020,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	473.218.052,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	125.275.422,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	719.274,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	94.208,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.921.474.892,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.010.340.426,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.000.925.746,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.957.207.706,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.155.850.510,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.320.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	600.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.700.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	34.500.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	296.810.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.349.989.090,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.167.125.400,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	158.200.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.742.185.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	918.264.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	76.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	20.719.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	158.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.472.478.320,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	803.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.139.942.200,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.375.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.108.000,00
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	300.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	176.614.200,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	888.803.400,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	52.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	598.915.400,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	201.004.800,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	615.215.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.409.120.720,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.977.430.042,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.999.166.542,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.206.258.536,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	701.265.600,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	395.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	130.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.972.236.476,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	32.972.236.476,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	420.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	420.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.722.328.337,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.555.363.518,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.880.945.388,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.758.510.690,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.915.907.440,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	166.964.819,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	166.964.819,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.665.309.976,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.485.309.976,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.616.450.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	200.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.668.859.976,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	180.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	117.074.440.278,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	117.074.440.278,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	117.074.440.278,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.764.829.025,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.764.829.025,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.764.829.025,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.445.015.146,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.445.015.146,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.445.015.146,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.445.015.146,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.582.829.676,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	664.400.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	664.400.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	664.400.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.264.500.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.138.400.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.138.400.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.476.100.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.476.100.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.926.560.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.926.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.926.560.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	26.727.369.676,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	18.058.269.676,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	18.058.269.676,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.669.100.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.669.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL	377.060.936.689,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.507.659.342,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.507.659.342,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.507.659.342,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	5.507.659.342,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.563.538.587,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	13.465.111.336,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	7.631.005.120,00
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	437.760,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	7.026.117.120,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	812.160,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	213.166.080,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	390.472.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.834.106.216,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	15.151.100,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	5.730.729.856,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	88.225.260,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	18.779.891.776,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	18.779.891.776,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.015.540.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.198.810.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.826.744.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	983.989.200,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.754.808.576,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	334.170.090,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.336.000,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.456.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	2.880.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	53.162.480,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	25.429.240,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	12.135.160,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	2.280.960,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	13.317.120,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	274.671.610,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	28.434.810,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.036.800,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	245.200.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	41.156.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	41.156.800,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	16.156.800,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	25.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.524.648.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.931.984.484,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	424.938.240,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.538.167.214,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	968.879.030,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.586.273.546,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.069.092.856,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	190.620.710,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.606.823.240,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.535.156.740,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	184.580.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.006.390.470,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.021.644.440,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	164.438.320,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	834.334.200,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	353.436.600,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	150.969.940,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	58.500.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	423.066.970,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	915.285.684,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	891.489.534,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.236.800,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	883.252.734,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	16.796.150,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	16.796.150,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	7.000.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	7.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.055.919.101,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	14.055.919.101,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	672.358.149,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.054.580.958,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	66.867.672,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	674.730.000,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	70.577.064,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.317.521.760,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	203.416.530,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	40.915.100,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.338.957.000,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	2.278.945.500,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	3.461.410.000,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	308.080.300,00
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	81.763.200,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	918.058.708,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	567.737.160,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.777.111.924,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.756.312.766,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	151.178.297,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	26.037.770,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	1.579.096.699,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	512.974.998,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	512.974.998,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.728.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.728.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.506.096.160,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	3.506.096.160,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.114.725.227,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.648.364.760,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.648.364.760,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.466.360.467,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	400.254.330,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.240.558.627,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	356.657.510,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.468.890.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.013.367.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.013.367.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.013.367.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.091.200,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	7.603.200,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	7.603.200,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	7.488.000,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	7.488.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.820.247.087,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11.820.247.087,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	11.820.247.087,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.706.812.862,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.706.812.862,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.706.812.862,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.802.273.451,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	64.201.620.872,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.201.620.872,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.001.419.812,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	420.840.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.998.840.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.310.260.620,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.388.080.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	82.180.440,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	430.508.209,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	430.508.209,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	430.508.209,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.170.144.370,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.170.144.370,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.170.144.370,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.994.205.790,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	141.666.633.810,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	137.347.533.810,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	36.751.215.910,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	100.231.770.500,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	364.547.400,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.319.100.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.319.100.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	53.320.071.980,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.880.772.500,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	21.880.772.500,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	29.284.299.480,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	29.284.299.480,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.755.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.755.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	400.000.000,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	400.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.500.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.500.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	7.500.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.650.392.959,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	60.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	60.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	60.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.590.392.959,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9.590.392.959,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	9.590.392.959,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	542.866.560,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	542.866.560,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	542.866.560,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	542.866.560,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	3.191.474.180.728,00
	Total Surplus/(Defisit)	20.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-20.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pj Wali Kota Pekanbaru



RONI RAKHMAT